

Peran Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Perspektif Fraud Pentagon pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah

David Kurniawan¹, Reskino^{2*}

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Trisakti

Email: david.kurniawan29@gmail.com¹, corresponding author: reskino@uinjkt.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak elemen *fraud pentagon model* terhadap kecurangan laporan keuangan dan menganalisis peran *good corporate governance* dalam memoderasi elemen *fraud pentagon model* pada kecurangan laporan keuangan pada kementerian dan lembaga pemerintah pada tahun 2019-2021. Sampel dipilih berdasarkan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan 81 kementerian dan lembaga pemerintah dengan 243 data observasi. Berdasarkan uji data panel, hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa rasionalisasi memberikan dampak signifikan pada indikasi terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Di sisi lain, faktor tekanan, kesempatan, kompetensi dan arogansi tidak mampu memberi dampak signifikan. Adapun penerapan *good corporate governance* terbukti mampu memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada di bidang kecurangan laporan keuangan dengan memperkuat landasan teoritis yang mendasarinya dan memperluas penelitian pada sektor publik atau pemerintahan yang memasukkan efek moderasi pada teori pendeteksian kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan.

Kata kunci: *Kecurangan; model fraud pentagon; kecurangan laporan keuangan; good corporate governance*

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of fraud pentagon model elements on financial statement fraud and analyze the role of good corporate governance in moderating fraud pentagon model elements on fraudulent financial statements in government ministries and agencies in 2019-2021. The sample was selected based on the purposive sampling method so that 81 ministries and government agencies were obtained with 243 observational data. Based on the panel data test, the results obtained show that rationalization has a significant impact on indications of fraud in financial statements. On the other hand, the factors of pressure, opportunity, competence, and arrogance cannot have a significant impact. The implementation of good corporate governance is proven to moderate the effect of rationalization on the possibility of fraud in financial reports.

Keyword: *Fraud; fraud pentagon model; financial statement fraud; good corporate governance*

PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Lembaga Pemerintah dan Kementerian semakin marak akhir-akhir ini. *Indonesia Corruption Watch* mencatat kasus korupsi tahun 2021 yang terjadi di level nasional (pemerintah pusat) sebanyak 12 kasus dengan nilai kerugian negara mencapai 23,13 triliun (Indonesia Corruption Watch, 2021). Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah yang bertugas memerangi fraud masih gagal mendeteksi kecurangan yang berdampak pada kerugian negara. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak menjamin satu daerah bebas dari korupsi (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Kondisi ini memicu para peneliti untuk berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Salah satu pendekatan paling awal yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan yaitu teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), yang terus dikembangkan hingga yang terakhir adalah teori *fraud heptagon theory* yang dikembangkan oleh Reskino (2022).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan. Rasio Keuangan sebagai alat deteksi kecurangan yang efektif direkomendasikan oleh pakar investigasi kecurangan (BAI et al., 2008). Namun berdasarkan hasil penelitian empiris, ditetapkan bahwa indikator yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan masih belum memungkinkan adanya pernyataan yang mutlak. Spathis (2002) dan Dalnial et al., (2014) menemukan bahwa rasio keuangan merupakan alat yang sangat efektif dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi, dalam penelitiannya Kaminski et al., (2004) menyatakan bahwa rasio keuangan bukanlah alat yang efektif untuk digunakan dalam mendeteksi kecurangan. Pernyataan Kaminski et al., (2004) mengenai informasi apa yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan masih perlu diklarifikasi.

Penelitian tentang kecurangan telah banyak dilakukan pada perusahaan *go public* seperti penelitian yang dilakukan oleh Thamlim & Reskino (2023) yang meneliti tentang *fraudulent financial reporting* dan menguji bagaimana peran *good corporate governance* sebagai mediator dengan pendekatan *fraud pentagon* perspektif. Alifa & Rahmawati (2022) meneliti mengenai analisis teori *hexagon fraud* sebagai pendeteksi *financial statement fraud* yang mengambil obyek penelitian pada 13 perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2020, Carla & Pangestu (2021) mengenai Deteksi *Fraudulent Financial Reporting* menggunakan *Fraud Pentagon* yang mengambil obyek penelitian pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan terdaftar di BEI periode tahun 2015-2018, serta A. R. Putra & Kusnoegroho (2021) yang berjudul Pengujian *Fraud Pentagon* dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan yang mengambil obyek penelitian pada perusahaan sector industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2020. Faktanya kecurangan tidak hanya terjadi di perusahaan *go public*, tetapi juga di organisasi sektor publik khususnya pemerintah.

Dampaknya pun tidak kalah merugikan dibanding dalam dunia usaha, antara lain membuat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu.

Penelitian yang berkaitan dengan teori pendeteksian kecurangan mulai dari *fraud triangle* hingga *fraud hexagon* pada perusahaan dan organisasi sektor publik pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dimana proksi yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor kecurangan dari penelitian tersebut berbeda-beda. Reskino & Anshori (2016) menguji model pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis *fraud triangle*. Penelitian tentang *fraud triangle* dalam mendeteksi kecurangan pada pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Maria & Gudono (2017) dimana faktor tekanan diproksikan dengan kinerja keuangan anggaran dan kemerdekaan daerah, faktor kesempatan diproksikan dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah dan ukuran organisasi, serta faktor rasionalisasi diproksikan dengan respon/tindak lanjut auditee terhadap rekomendasi temuan BPK. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan teori *fraud triangle* ditunjukkan dengan faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan pada pemerintah daerah di Indonesia. Sukmadilaga et al. (2022) memproksikan faktor tekanan dengan rasio realisasi anggaran dibandingkan pengajuan anggaran, faktor kesempatan diproksikan dengan penerapan *whistleblowing system (dummy)*, faktor rasionalisasi diproksikan dengan variabel *dummy* dimana opini WTP bernilai “1” dan selain opini WTP bernilai “0”, faktor kompetensi diproksikan dengan pergantian pemimpin (*dummy*), arogansi diproksikan dengan tingkat pendidikan kepala instansi (*dummy*), dan faktor kolusi diproksikan dengan penerapan pengadaan menggunakan LPSE (*dummy*).

Hasil lainnya juga menunjukkan bahwa tiga dari enam elemen yang diteliti yaitu kesempatan, arogansi dan kolusi mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan, tetapi tidak dapat membuktikan pengaruh tekanan, rasionalisasi dan kapabilitas terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sari & Khoiriah (2021) memproksikan faktor tekanan dengan stabilitas keuangan, target keuangan dan tekanan luar, faktor kesempatan diproksikan dengan jumlah temuan pengendalian internal yang berisi salah saji material, faktor rasionalisasi diproksikan dengan jumlah tindak lanjut rekomendasi BPK, faktor kompetensi diproksikan dengan pergantian kepala instansi (*dummy*), faktor arogansi diproksikan dengan kepatuhan dalam pelaporan LHKPN oleh kepala instansi (*dummy*), dan faktor kolusi diproksikan dengan adanya keterkaitan pemerintah dengan sektor privat (*dummy*). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor tekanan (stabilitas keuangan dan target keuangan), kesempatan, kompetensi, dan arogansi berpengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi faktor tekanan (tekanan eksternal), rasionalisasi dan kolusi tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tentang *good corporate governance (GCG)* sebagai efek moderasi pada *fraud pentagon theory* terhadap kecurangan di sektor publik belum banyak diteliti. Penelitian mengenai efek moderasi GCG pada teori pendeteksian kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan sudah pernah dilakukan sebelumnya pada sektor privat,

antara lain yang dilakukan oleh (Ats'tsaqafiyah & Reskino, 2022; Pamungkas et al., 2018; Rohmatin et al., 2021; Sawaka K., 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang belum menunjukkan hasil yang konsisten dan belum adanya penelitian pada sektor publik atau pemerintahan yang memasukkan efek moderasi pada teori pendeteksian kecurangan terhadap kecurangan laporan keuangan, penelitian ini bermaksud mengisi kekosongan dari penelitian terdahulu dengan menguji efek moderasi GCG terhadap pengaruh teori *fraud pentagon* pada kecurangan laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah.

LITERATURE REVIEW DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan dalam tata kelola yang baik. Teori keagenan adalah bagian dari kelompok teori positivis yang berasal dari literatur ekonomi keuangan. Adams (1994) menyatakan bahwa teori keagenan terdiri dari hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) sumber daya ekonomi dan manajer (*agent*) yang ditugaskan untuk menggunakan dan mengendalikan sumber daya tersebut. Agen dengan motif cenderung mengambil kesempatan untuk bertindak melawan kepentingan pemiliknya, misalnya agen mengambil bagian dalam tingkat konsumsi yang tinggi bahkan melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut (Indra, 2020), pemerintah berperan sebagai agen yang melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan DPR bertindak sebagai prinsipal yang mewakili warga negara dalam sistem pemerintahan.

Fraud atau kecurangan

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE Indonesia, 2016), *fraud* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok baik secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Sedangkan Albrecht et al. (2012) mendefinisikan *fraud* adalah istilah umum yang mencakup semua cara yang beraneka ragam yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari individu lain melalui representasi palsu. Dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang disengaja dengan maksud menipu dan mengambil keuntungan dari pihak lain. ACFE telah mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam tiga bentuk berdasarkan perbuatan, yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) dan korupsi (*corruption*). Penelitian ini menggunakan klasifikasi kecurangan laporan keuangan yang merupakan kelalaian yang disengaja atas informasi dalam laporan keuangan yang dirancang untuk mengelabui pengguna laporan keuangan. Kelalaian tersebut dapat berupa salah saji, pengabaian

jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pengguna laporan keuangan.

Teori fraud pentagon

Teori *fraud pentagon* merupakan perkembangan dari teori pendeteksian *fraud* yang diperkenalkan oleh Horwath (2011). Awal mulanya faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* atau kecurangan telah dikenalkan oleh Cressey (1953) dengan nama teori *fraud triangle* yang menyatakan adanya tiga elemen/faktor yang menjadi penyebab terjadinya *fraud* atau kecurangan yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Dalam perkembangannya, Wolfe & Hermanson (2004) menambahkan satu faktor ke dalam teori *fraud triangle* yang ditemukan oleh Cressey yaitu kompetensi (*competence*) yang disebut teori *fraud diamond*. Pada tahun 2011, Crowe Horwath mengembangkan teori *fraud pentagon* dengan menambahkan arogansi (*arrogance*). Terdapat keterkaitan antara elemen-elemen dalam teori *fraud pentagon* dan kecurangan laporan keuangan, yang dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh tekanan (*pressure*) terhadap kecurangan laporan keuangan

Tekanan merupakan dorongan orang untuk melakukan kecurangan, dapat mencakup hampir semua hal yang berkaitan dengan keuangan maupun non keuangan. Shelton (2014) mendefinisikan tekanan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan, biasanya karena beban keuangan. Menurut *Statement of Auditing Standards* (SAS) No 99 terdapat tiga jenis kondisi yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan yaitu *financial target*, *financial stability*, dan *external pressure* (Skousen et al., 2009). Manajemen perusahaan menerima tekanan ketika harus mencapai target keuangan dan stabilitas keuangan sehingga dapat terus melaporkan kinerja perusahaan dengan baik. Dalam posisi ini, manajemen dapat melakukan kecurangan untuk tetap menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang stabil dan menjanjikan profitabilitas yang baik (Haqq & Budiwitjaksono, 2019). Pada penelitian yang dilakukan Maria & Gudono (2017), Sari & Khoiriah (2021) menemukan bahwa tekanan memberikan dampak yang signifikan terhadap kecurangan. Dalam penelitian ini elemen tekanan diprosikan dengan target keuangan/target anggaran. Target anggaran adalah target yang ditetapkan oleh manajemen atau manajer entitas. Indikator pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia terletak pada penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan organisasi telah memenuhi target anggaran atau bisa dibilang penyerapan anggaran bisa saja dilakukan dengan melebihi-lebihkan pengeluaran untuk mencapai target anggaran karena berfungsi sebagai indikator kinerja organisasi, menciptakan tekanan bagi individu untuk melaporkan penyerapan anggaran yang tinggi. Akibatnya dapat menyebabkan pada pelaporan keuangan yang curang atau terjadi tindakan curang dalam proses penyerapan anggaran. Untuk menguji hubungan antara tekanan dan kecurangan pada laporan keuangan kementerian dan

lembaga pemerintah di Indonesia, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Tekanan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap kecurangan laporan keuangan

Kesempatan adalah kondisi dimana suatu kejahatan sangat mungkin untuk dilakukan. Shelton (2014) menyatakan kesempatan adalah metode kejahatan yang bisa dilakukan, seperti beban keuangan. Dalam teori keagenan, kondisi asimetri informasi antara principal dan agen membuka kesempatan bagi agen untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Peluang juga akan muncul ketika Sistem Pengendalian Intern (SPI) suatu perusahaan lemah (Huang et al., 2017). Kelemahan pengendalian internal pada sektor publik dapat dilihat dengan banyaknya temuan kelemahan SPI yang mengandung salah saji material (Kusuma et al., 2017). Untuk menguji hubungan antara kesempatan dan kecurangan pada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ : Kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Pengaruh rasionalisasi (*rationalization*) terhadap kecurangan laporan keuangan

Rasionalisasi merupakan elemen ketiga dalam teori *fraud triangle* dan merupakan elemen yang paling sulit untuk diukur (Skousen et al., 2009). Rasionalisasi adalah sikap yang membolehkan seseorang melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya tersebut tidaklah salah. Mereka yang terlibat dalam penipuan laporan keuangan mampu merasionalisasi tindakan kecurangan secara konsisten dengan kode etik mereka sendiri (Suyanto, 2009). Ada beberapa kondisi terkait kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu perubahan auditor. Loebbecke (Skousen et al., 2009) menunjukkan kejadian kegagalan audit dan peningkatan litigasi segera setelah perubahan auditor, sehingga perubahan auditor digunakan untuk mengukur rasionalisasi. Selain perubahan auditor, opini audit juga digunakan sebagai proksi dari rasionalisasi. Francis dan Krishnan (Skousen et al., 2009) juga menggunakannya. Rasionalisasi juga dapat diproksikan dengan pergantian auditor karena upaya menghilangkan jejak audit terkait ditemukannya kecurangan pada audit sebelumnya (Yesiariani & Rahayu, 2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mempersyaratkan bahwa pemeriksa harus meminta tanggapan tertulis dari pejabat yang membidangi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dan melaporkannya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017). Hal ini menunjukkan bahwa rasionalisasi dapat dilihat dengan mengamati tanggapan dari pihak auditee yang dilaporkan secara tertulis oleh auditor dalam LHP. Untuk menguji hubungan antara rasionalisasi dan kecurangan pada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Pengaruh kompetensi (*competence*) terhadap kecurangan laporan keuangan

Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa kecurangan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail kecurangan. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi dalam penelitian ini merupakan besarnya daya dan kapasitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Sistem pengendalian internal yang lemah memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Seseorang tersebut harus memiliki kemampuan/kompetensi untuk mengenali peluang sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan (Diaz, 2013). Dalam penelitian yang sama di sektor privat, kompetensi diproksikan dengan perubahan pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan. Perubahan ini bisa dikarenakan muatan politik dan kepentingan pihak tertentu yang memicu konflik kepentingan. Di sektor publik, pergantian pimpinan tertinggi perusahaan dapat disamakan dengan pergantian Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan. Untuk menguji hubungan antara kompetensi dan kecurangan pada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄ : Kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Pengaruh arogansi (*arrogance*) terhadap kecurangan laporan keuangan

Arogansi adalah sifat superioritas atau keserakahan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dan merasa bahwa pengendalian internal dan kebijakan perusahaan serta prosedur tidak diterapkan kepadanya. Sukmadilaga et al. (2022) menggunakan tingkat pendidikan Kepala Daerah untuk memproksikan elemen arogansi, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mempengaruhi arogansi dari Kepala Daerah yang bersangkutan dengan menambah keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan kecurangan dan tidak ada pengendalian internal yang akan mempengaruhi dirinya sehingga pelaku melakukan kecurangan tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Pada tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, Kepala Daerah dapat digantikan dengan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah. Pemimpin dengan latar belakang pendidikan tinggi berpotensi melakukan kecurangan karena dianggap memiliki kecerdasan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya (Nichita et al., 2019). Selain itu, Vousinas (2019) menyatakan bahwa individu narsistik memandang diri mereka lebih mampu dan unik serta cenderung melebih-lebihkan keterampilan mereka. Untuk menguji hubungan antara arogansi dan kecurangan pada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia, hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

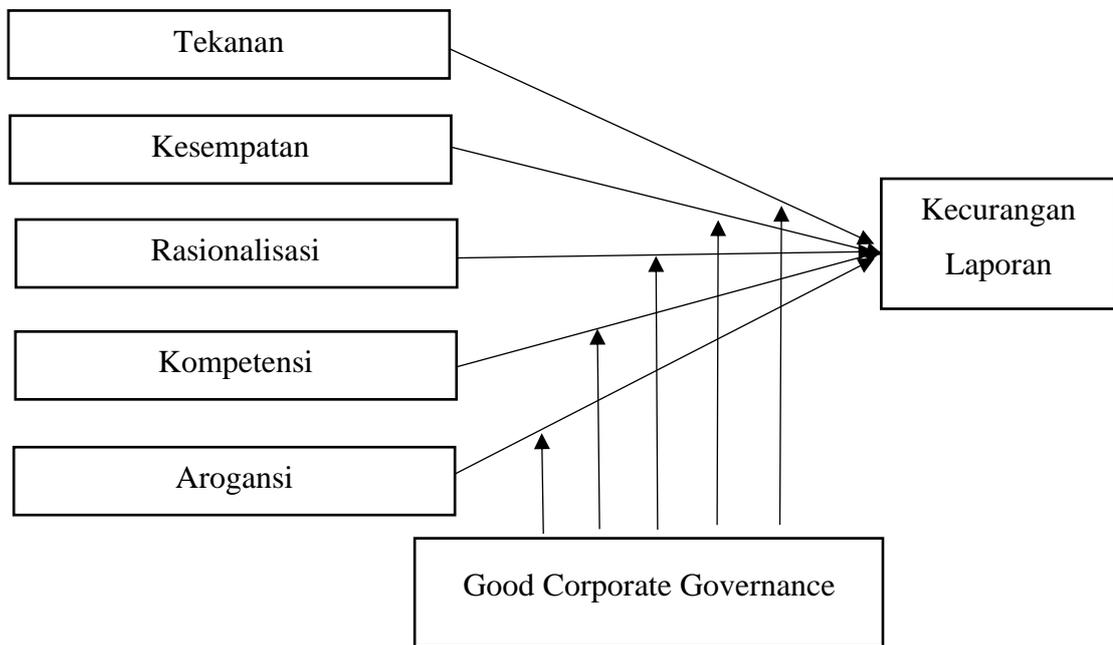
H₅ : Arogansi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan

Pengaruh moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan

Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau entitas yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* yaitu dengan memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Feddersen & Keuangan, 1996). Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) di lingkungan pemerintahan merupakan wujud komitmen pemerintah untuk membangun *good governance*. Hal tersebut juga diikuti dengan transparansi pelaporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Haeli, 2020). Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang telah dijalankan dengan baik diindikasikan dengan opini yang diberikan oleh BPK kepada instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Pengelolaan keuangan negara dihadirkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat (Haeli, 2020). Untuk menguji efek moderasi GCG pada hubungan antara tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi terhadap kecurangan pada laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

- H₆ : GCG memperlemah pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan**
- H₇ : GCG memperlemah pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan**
- H₈ : GCG memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan**
- H₉ : GCG memperlemah pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan**
- H₁₀ : GCG memperlemah pengaruh arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan**

Rerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Rerangka Konseptual

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Juliandi et al. (2014) menyatakan penelitian asosiatif adalah penelitian yang berupaya untuk mengkaji bagaimana suatu variabel memiliki keterkaitan atau berhubungan dengan variabel lain, atau apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya, atau apakah suatu variabel menjadi sebab perubahan variabel lainnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia yang telah diaudit oleh BPK RI Tahun Anggaran 2019-2021 dan informasi terkait Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah yang diakses dari berbagai sumber yang valid. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu: (1) Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019-2022, (2) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terpublikasi dalam portal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS) BPK, (3) memiliki data lain yang diperlukan terkait dengan variabel penelitian dan tersedia sepanjang tahun anggaran 2019-2021.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pada laporan keuangan. Dalam menyusun data untuk analisis isi, peneliti menggunakan laporan rugi laba dan laporan posisi keuangan (neraca) untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Pengukuran variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Penelitian

No	Deskripsi Variabel	Referensi	Pengukuran	Skala
1.	Kecurangan pada laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia (Y)	(Sukmadilaga et al., 2022)	Rasio <i>Leverage</i> = $\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$	Rasio
2.	Target Keuangan (X ₁)	(Sari & Khoiriah, 2021; Maria & Gudono, 2017; Skousen et al., 2009)	Rasio Penyerapan Anggaran Belanja = $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$	Rasio
3.	Kesempatan (X ₂)	(Kusuma et al., 2017; Sari & Khoiriah, 2021)	Banyaknya temuan kelemahan pengendalian internal yang mengandung salah saji material Skor = 0 untuk tidak ada Skor = 1 untuk 1 atau lebih temuan	Dummy
4.	Rasionalisasi (X ₃)	(Sukmadilaga et al., 2022; Maria & Gudono, 2017)	Banyaknya tanggapan/tindak lanjut <i>auditee</i> terhadap rekomendasi BPK	Rasio
5.	Kompetensi (X ₄)	(Sukmadilaga et al., 2022; Sari & Khoiriah, 2021)	Pergantian Kepala Daerah Skor = 0 untuk tidak ada Skor = 1 untuk ada pergantian Kepala Daerah	Dummy
6.	Arogansi (X ₅)	(Sukmadilaga et al., 2022)	Tingkat Pendidikan Kepala Daerah Skor = 0 untuk tingkat pendidikan S1 ke bawah Skor = 1 untuk tingkat pendidikan S2 ke atas	Dummy
7.	Good Corporate Governance (Z)	(Haeli, 2020)	Opini BPK Skor = 0 untuk Kementerian/Lembaga yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat), dan Adverse (Tidak Wajar) Skor = 1 untuk Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Dummy

Data yang terkumpul akan dianalisis secara statistik pada tahap analisis data untuk melihat apakah hipotesis telah didukung. Oleh karena itu, hipotesis penelitian diuji melalui analisis statistik yang sesuai (Sekaran & Bougie, 2016). Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi 5% melalui model regresi dengan persamaan (1).

$$FFS = a + b_1 TK + b_2 KS + b_3 RS + b_4 KM + b_5 AR + b_6 (TK*GCG) + b_7 (KS*GCG) + b_8 (RS*GCG) + b_9 (KM*GCG) + b_{10} (AR*GCG) + e \dots\dots\dots(1)$$

FFS merupakan kecurangan laporan keuangan, TK sebagai target keuangan, KS adalah kesempatan, RS adalah rasionalisasi, KM adalah kompetensi, AR adalah arogansi dan GCG adalah *good corporate governance*.

HASIL DAN DISKUSI

Terdapat 90 Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia pada periode waktu tahun 2019 hingga 2021. Berdasarkan hasil telaah sampel penelitian sesuai kriteria yang telah ditetapkan, terdapat 81 laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia yang memenuhi syarat menjadi sampel penelitian, hal ini disebabkan terdapat sebanyak 9 LHP Kementerian dan Lembaga yang tidak terpublikasi secara lengkap dalam kurun waktu 3 tahun tersebut. Sampel penelitian secara keseluruhan selama periode tiga tahun atau periode tahun 2019 hingga 2021 adalah 243. Rincian pemilihan kriteria sampel dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pemilihan Sampel

Kriteria	Total
Jumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah tahun 2019-2021	90
LHP tidak terpublikasi dengan lengkap dalam portal IHPS BPK	(9)
Data lain yang diperlukan terkait dengan variabel penelitian dan tersedia sepanjang tahun anggaran 2019-2021	90
Jumlah akhir Kementerian dan Lembaga yang memenuhi kriteria	81
Periode penelitian	3 tahun
Jumlah sampel observasi	243

Analisis statistik deskriptif

Data-data deskriptif yang diperoleh dari responden penelitian dalam hal ini yaitu data yang tertuang dalam laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia yang memenuhi kriteria penelitian. Data deskriptif ini menggambarkan keadaan atau kondisi untuk memahami hasil-hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Rata-rata Variabel Penelitian

Variabel	N	Mean	Min	Max	Std
Deviation					
Kecurangan LK (FFS) 964,660	243	16,700	-2.000,000	2.000,000	
Tekanan (TK) 65,432	243	-0,012	-484,000	64,000	
Kesempatan (KS) 464,044	243	17,350	-296,000		1.000,000
Rasionalisasi (RS) 949,554	243	41,658	-2.070,000	2.000,000	
Kompetensi (KM) 470,319	243	17,099	-305,000	1.000,000	
Arogansi (AR) 384,416	243	-10,498	-1.000,000	181,000	
Good Corporate Governance (GCG) 936,871	243	4,827	-2.000,000	2.000,000	

Berdasarkan output data pada tabel 3 diketahui bahwa nilai rata-rata variabel kecurangan laporan keuangan (FFS), tekanan (TK), kesempatan (KS), rasionalisasi (RS),

kompetensi (KM), dan arogansi (AR) memiliki nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini memiliki data yang cukup bervariasi.

Pengujian Goodness of Fit Model

Goodness of fit model pada *model PLS* dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil pengujian *goodness of fit model PLS* pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *SRMR saturated model* dan nilai *SRMR estimated model* memiliki nilai 0,000 (< 0,10). Hal ini menunjukkan bahwa *model PLS* dinyatakan layak untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Pengujian goodness of fit model

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,000	0,000
d_ULS	0,000	0,000
d_G	0,000	0,000
Chi-Square	0,000	0,001
NFI	1,000	1,000

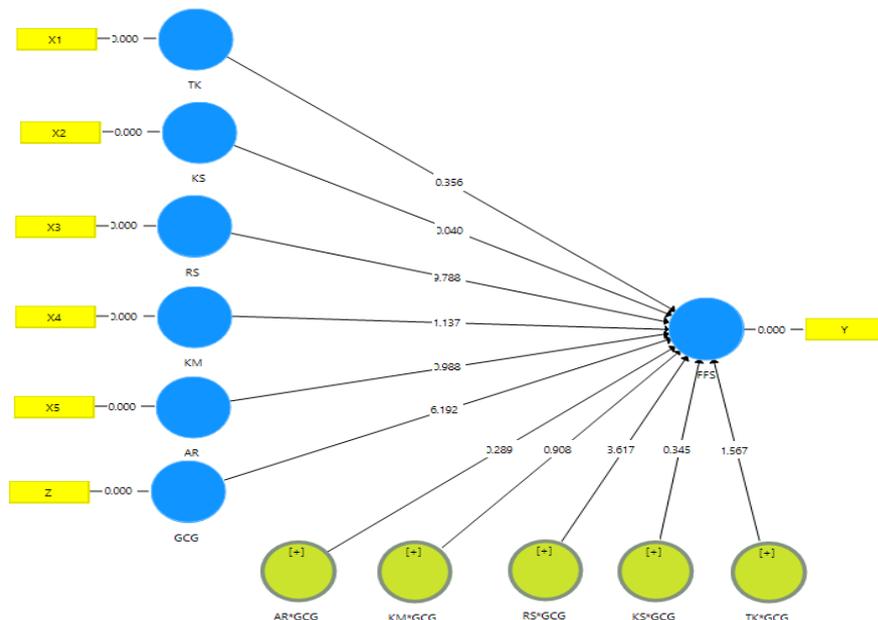
Tabel 5. Hasil pengujian hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	t-statistics ((O/STDEV))	P-values
AR -> FFS	0,043	0,039	0,043	0,988	0,324
AR*GCG -> FFS	0,011	0,008	0,038	0,289	0,772
GCG -> FFS	0,301	0,305	0,049	6,192	0,000
KM -> FFS	-0,051	-0,048	0,045	1,137	0,256
KM*GCG -> FFS	0,035	0,035	0,039	0,908	0,364
KS -> FFS	0,002	0,003	0,044	0,040	0,968
KS*GCG -> FFS	-0,015	-0,016	0,045	0,345	0,730
RS -> FFS	0,533	0,534	0,054	9,788	0,000
RS*GCG -> FFS	0,168	0,163	0,046	3,617	0,000
TK -> FFS	-0,014	-0,014	0,040	0,356	0,722
TK*GCG -> FFS	0,057	0,051	0,036	1,567	0,118

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 2. Hal ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak, hal ini diindikasikan nilai *p value* Tekanan (TK) terhadap indikasi Kecurangan Laporan Keuangan (FFS) (TK → FFS) adalah sebesar 0,722 dengan *t-statistik* sebesar 0,356. Oleh karena nilai *p-value* > 0,05 dan *t-statistik* < 1,96 maka *H_a* ditolak atau *H₀* diterima dan disimpulkan bahwa tekanan (TK) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Target penyerapan anggaran yang digunakan sebagai salah satu variabel pengukuran pelaksanaan evaluasi kinerja suatu instansi pemerintah (Putra, 2021), sehingga target penyerapan anggaran meskipun digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja, hal ini bukanlah salah satu penyebab kecurangan laporan keuangan. Motivasi untuk bekerja profesional dalam memenuhi target yang sudah ditetapkan menyebabkan target tidak menjadi beban atau tekanan dalam bekerja (Rohmatin et al., 2021). Penelitian Apriliana & Agustina (2017); Pamungkas et al. (2018); dan Sukmadilaga et al. (2022) juga menyimpulkan hal yang sama yaitu bahwa tekanan yang diprosikan dengan target keuangan tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sari & Khoiriah (2021); Maria & Gudono (2017); dan Angelina & Christian (2022) yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh secara signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.



Gambar 2. Estimasi Model PLS

Hasil pengujian hipotesis ke-2 pada penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* kesempatan (KS) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS) ($KS \rightarrow FFS$) adalah sebesar 0,968 dengan $t_{\text{statistik}}$ sebesar 0,040. Oleh karena nilai *p-value* > 0,05 dan $t_{\text{statistik}} < 1,96$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa kesempatan (KS) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Temuan kelemahan SPI yang mengandung salah saji material menjadi indikasi adanya kecurangan dan menjadi pengecualian dalam opini terhadap laporan keuangan pemerintah (Kusuma et al., 2017). Kualitas hasil pemeriksaan menunjukkan mutu dari hasil pemeriksaan. Masyarakat memiliki ekspektasi bahwa hasil pemeriksaan BPK harus mengungkapkan sebanyak mungkin temuan kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh *auditee*, tetapi seringkali hasil pemeriksaan BPK tidak mengungkapkan temuan kesalahan dan kecurangan yang material. Kemampuan auditor untuk menemukan dan mengungkapkan temuan dipengaruhi oleh pengalaman audit yang dimilikinya serta jumlah pelatihan yang diikutinya (Juniansyah & Fachriyah, 2019). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian (Sari & Khoiriah, 2021) yang menemukan bahwa kesempatan berpengaruh signifikan terhadap indikasi Kecurangan Laporan Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis ke-3 pada penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* rasionalisasi (RS) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS) ($RS \rightarrow FFS$) adalah sebesar 0,000 dengan *t-statistik* sebesar 9,788. Oleh karena nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistik* > 1,96 maka H_a diterima atau H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa rasionalisasi (RS) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Hasil penelitian ini sejalan dengan Maria & Gudono (2017) yang menyebutkan semakin banyak jumlah tanggapan *auditee* yang menyangkal temuan auditor menunjukkan semakin besar upaya *auditee* untuk merasionalisasi tindakan mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Penelitian ini tidak selaras dengan Nuruddin & Rahmawati (2021) yang menyatakan tanggapan *auditee* terhadap rekomendasi audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan pada pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil pengujian hipotesis ke-4 pada penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* kompetensi (KM) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS) ($KM \rightarrow FFS$) adalah sebesar 0,256 dengan *t-statistik* sebesar 1,137. Oleh karena nilai *p-value* > 0,05 dan *t-statistik* < 1,96 maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa kompetensi (KM) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Hal ini sejalan dengan Sukmadilaga et al. (2022) yang menyebutkan bahwa perubahan pemimpin tidak terkait dengan kecurangan dalam organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung Apriliana & Agustina (2017) yang menemukan bahwa kompetensi atau kapabilitas tidak mempengaruhi pelaporan keuangan yang curang. Hal ini juga dimungkinkan dengan adanya keputusan politis dalam pemilihan menteri ataupun lembaga pemerintah yang dapat sejalan membantu peran presiden dalam pemerintahan.

Hasil pengujian hipotesis ke-5 pada penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* arogansi (AR) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS) ($AR \rightarrow FFS$) adalah sebesar 0,324 dengan *t-statistik* sebesar 0,988. Oleh karena nilai *p-value* > 0,05 dan *t-statistik* < 1,96 maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa arogansi (AR) tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Hasil penelitian ini berbeda dengan Sukmadilaga et al. (2022) yang menyatakan bahwa arogansi memiliki pengaruh positif pada kecurangan pelaporan keuangan di kementerian dan lembaga pemerintah. Arogansi yang diwakili dengan tingkat pendidikan menteri atau kepala lembaga pemerintah tidak berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan dapat disebabkan karena pada kementerian dan lembaga pemerintah secara khusus menangani bidang-bidang yang membutuhkan keahlian profesional, sehingga presiden memilih dan menetapkan pimpinan tertinggi pada kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

Pengujian *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel independen terhadap kecurangan laporan keuangan (FFS) menunjukkan nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistik* > 1,96 yang berarti bahwa *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Pada pengujian efek moderasi GCG pada

pengaruh variabel independen penelitian ini terhadap variabel dependennya menunjukkan bahwa H_8 diterima dengan nilai p -value 0,000 dan t -statistik 3,617 sehingga dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* memperlemah pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan (FFS) pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Rohmatin et al. (2021).

Pengujian efek moderasi GCG pada pengaruh tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan menghasilkan nilai p -value 0,118 dan t -statistik 1,567. Oleh karena nilai p -value $>0,05$ dan t -statistik $<1,96$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* tidak mampu memberikan efek moderasi pada pengaruh tekanan (TK) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Hasil penelitian ini mengkonfirmasi Rohmatin et al. (2021) dan Pamungkas et al. (2018) yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* tidak memoderasi pengaruh tekanan terhadap kecurangan keuangan.

Pengujian efek moderasi GCG pada pengaruh kesempatan terhadap kecurangan laporan keuangan menghasilkan nilai p -value 0,730 dan t -statistik 0,345. Oleh karena nilai p -value $>0,05$ dan t -statistik $<1,96$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* tidak mampu memperlemah pengaruh kesempatan (KS) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Kegagalan auditor dalam menemukan kelemahan SPI yang mengandung salah saji material dapat menjadi penyebab GCG tidak mampu memberikan efek moderasi pada pengaruh kesempatan terhadap indikasi kecurangan pada laporan keuangan.

Pengujian efek moderasi GCG pada pengaruh kompetensi terhadap kecurangan laporan keuangan menghasilkan nilai p -value 0,364 dan t -statistik 0,908. Oleh karena nilai p -value $>0,05$ dan t -statistik $<1,96$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* tidak mampu memperlemah pengaruh kompetensi (KM) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Pergantian pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah seringkali tidak berkaitan dengan kompetensi, bahkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik termasuk dalam transparansi pelaporan keuangan, informasi tentang pimpinan suatu instansi tidak terlalu terlihat. Hal ini sejalan dengan Rohmatin et al. (2021).

Pengujian efek moderasi GCG pada pengaruh arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan menghasilkan nilai p -value 0,772 dan t -statistik 0,289. Oleh karena nilai p -value $>0,05$ dan t -statistik $<1,96$ maka H_a ditolak atau H_0 diterima dan disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* tidak mampu memperlemah pengaruh arogansi (AR) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan (FFS). Hasil penelitian ini sejalan dengan Rohmatin et al., (2021) dan Pamungkas et al., (2018) yang menemukan bahwa GCG tidak memoderasi arogansi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh teori *fraud pentagon* pada kecurangan laporan keuangan dan menguji efek moderasi GCG terhadap pengaruh teori

fraud pentagon pada kecurangan laporan keuangan kementerian dan lembaga. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa hanya rasionalisasi yang mempengaruhi kecurangan pada laporan keuangan. Sebaliknya, kecurangan pada laporan keuangan tidak ditentukan oleh faktor tekanan, kesempatan, kompetensi, dan arogansi.

Selain itu, pada pengujian efek moderasi, penelitian ini menemukan bahwa dalam rangka penerapan *good corporate governance* (GCG) yang efektif pada semua level organisasi akan membantu meminimalisir terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dipicu oleh faktor rasionalisasi. Sementara di sisi lain, GCG tidak mampu meminimalisir terjadinya kecurangan pada laporan keuangan yang dipicu oleh faktor tekanan, kesempatan, kompetensi, dan arogansi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh rasionalisasi, dimana auditee dengan banyaknya tanggapan atas hasil audit yang telah mereka selesaikan, merasionalisasi bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dapat mereka selesaikan dan menganggap hal tersebut hanyalah kesalahan kecil yang dapat mereka selesaikan. Hal tersebut meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diminimalisir dengan komitmen pemerintah dalam penerapan GCG. Komitmen pemerintah dengan mewujudkan transparansi pelaporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan pemerintahan sudah dijalankan secara benar sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

Penelitian ini hanya mengkonfirmasi pengaruh pada satu variabel saja, yaitu rasionalisasi yang berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengembangan pengukuran atas beberapa variabel independen sehingga menggunakan variabel *dummy* dalam penelitian ini.

Pada penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan ketersediaan data untuk mendapatkan generalisasi hasil yang lebih luas dan kesimpulan yang komprehensif dari hasil penelitian. Disarankan juga untuk mengembangkan pengukuran dengan mengkombinasikan data sekunder dan data primer, serta memperkaya dengan penggunaan data lain selain laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia. (2016). Survei Fraud Indonesia 2016. *Auditor Essentials*, 1–60.
- Adams, M. B. (1994). Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, 9(8), 8–12. <https://doi.org/10.1108/02686909410071133>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. *Mason, Ohio USA: Cengage Learning*, 4(1), 88–100.
- Alifa, R., & Rahmawati, M. I. (2022). Analisis Teori Hexagon Fraud sebagai Pendeteksi Financial Statement Fraud. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(6).
- Angelina, C., & Christian, N. (2022). Analisis teori fraud pentagon S.C.O.R.E method dalam mendeteksi fraud pada laporan keuangan perusahaan. *Jurnal*

- Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 485–497.
- Apriliansa, S., & Agustina, L. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.15294/jda.v7i1.4036>
- Ats'tsaqafiyah, I., & Reskino. (2022). Apakah Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Berperan Dalam Memoderasi Hubungan Manajemen Laba dan Return Saham Inayah. *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 157–173.
- Bai, B., Yen, J., & Yang, X. (2008). False financial statements: characteristics of China's listed companies and cart detecting approach. *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 07(02), 339–359. <https://doi.org/10.1142/S0219622008002958>
- Carla, C., & Pangestu, S. (2021). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Fraud Pentagon. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 125–142. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v13i1.1857>
- Cressey, D. R. (Donald R. (1953). *Other people's money; a study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z. M., & Khairuddin, K. S. (2014). Detecting Fraudulent Financial Reporting through Financial Statement Analysis. *Journal of Advanced Management Science*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.12720/joams.2.1.17-22>
- Fedderson, D. (Hrsg. ., & Keuangan, D. A. N. K. (1996). *Corporate Governance*. 6, 1–26.
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus). *Jurnal Bestari*, 1–9.
- Haqq, A. P. N. A., & Budiwitjaksono, G. S. (2019). Fraud Pentagon For Detecting Financial Statement Fraud. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 319–332. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1788.ABSTRACT>
- Horwath, C. (2011). The Mind Behind the Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Elements. *United States of America: Crowe Horwath LLP*, 1–62. https://www.fraudconference.com/uploadedFiles/Fraud_Conference
- Huang, S. Y., Lin, C. C., Chiu, A. A., & Yen, D. C. (2017). Fraud detection using fraud triangle risk factors. *Information Systems Frontiers*, 19(6), 1343–1356. <https://doi.org/10.1007/s10796-016-9647-9>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. *Indonesia Corruption Watch*, 1–40.
- Indra, I. (2020). the Effect of Human Resources and Information Technology on the Revaluation of Government Fixed Assets. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 129–142. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i2.469>
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri. In *Metodologi Penelitian Bisnis* (p. 223).
- Juniansyah, I., & Fachriyah, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan

- Prov. Kepulauan Bangka Belitung). *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, 1971.
- Kaminski, K. A., Wetzel, T. S., & Guan, L. (2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting. *Managerial Auditing Journal*, 19, 15–28.
- Kusuma, I., Perdana, H. D., & Suranta, S. (2017). Fraudulent Financial Reporting By District / Municipal Government in Indonesia1. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.01.03>
- Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical test of fraud triangle theory on local government (evidence from Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(4), 233–248.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Nuruddiniah, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi (JRAK)*, 12(1), 110–124.
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., Achmad, T., Khaddafi, M., & Hidayah, R. (2018). *Corporate Governance Mechanisms in Preventing Accounting Fraud: A Study of Fraud Pentagon Model*. *Journal of Applied Economic Sciences*.
- Putra, A. R., & Kusnoegroho, Y. A. (2021). Pengujian Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(2), 172–185. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i2.6269>
- Putra, Y. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Anggaran Aspek Implementasi Pada Satuan Kerja Lingkup Bpkp Ri: Analisis Perbandingan. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 92–112. <https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art122>
- Reskino, & Anshori, M. F. (2016). Model pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 95, 256–269. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.08.7020>
- Rohmatin, B. L., Apriyanto, G., & Zuhroh, D. (2021). The role of good corporate governance to fraud prevention: An analysis based on the fraud pentagon. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(2), 280–294. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5554>
- Sari, S. P., & Khoiriah, N. (2021). Hexagon fraud detection of regional government financial statement as a fraud prevention on the pandemic crisis era. *Wacana.Ub.Ac.Id*, 24(2), 90–96. <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/897>
- Sawaka K., I. G. N. H. (2020). Fraud pentagon theory in detecting financial perception of financial reporting with good corporate governance as moderator variable. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 84–94. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v7n1.824>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building approach. *John Wiley & Sons Ltd.*, 34(7), 700–701. <https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079>

- Shelton, A. M. (2014). *Analysis of capabilities attributed to the fraud diamond analysis of capabilities attributed to the fraud diamond acct 4018- senior honors seminar*.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Advances in Financial Economics*, 13(99), 53–81. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Spathis, C. T. (2002). Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal*, 17(4), 179–191. <https://doi.org/10.1108/02686900210424321>
- Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent financial reporting in ministerial and governmental institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory. *Economies*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/economies10040086>
- Suyanto, S. (2009). Fraudulent financial statement: evidence from statement on auditing standard No. 99. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 11(1), 117. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.5539>
- Thamlim, W., & Reskino. (2023). Fraudulent financial reporting with fraud pentagon perspective: The role of corporate governance as moderator. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 07(01), 18–38.
- Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (2017). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). *BPK Regulation No.1 2017*, 107.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Wolfe, D. T. and Hermanson, D. R. (2004) ‘The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant’, *The CPA Journal*, 74(12), pp. 38–42. doi: DOI:raud Diamond : Considering the Four ElemWolfe, D. T. and Hermanson, D. R. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi financial statement fraud: Pengujian dengan fraud diamond. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(1), 49–60. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss1.art5>